

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian temuan lapangan yang diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen, serta wawancara dengan pihak-pihak yang menangani isu *migrant smuggling* Rohingya di Aceh, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh pada periode 2022–2024 berkaitan erat dengan kondisi krisis berkepanjangan yang mereka alami di Myanmar dan Bangladesh, sekaligus dengan berkembangnya jaringan *migrant smuggling* yang semakin terstruktur. Para pengungsi yang tiba di Aceh berada dalam kondisi sangat rentan dan kerap menjadi korban penipuan, eksploitasi, kekerasan, serta *migrant smuggling* yang dijalankan oleh aktor-aktor transnasional maupun lokal.

Pola *migrant smuggling* selama periode ini memperlihatkan perubahan modus, termasuk perpindahan kapal di tengah laut, pemanfaatan celah pengawasan maritim, serta keterlibatan oknum yang memanfaatkan reputasi Aceh sebagai wilayah yang humanis terhadap pengungsi. Kompleksitas ini menjadikan Aceh bukan hanya titik pendaratan, tetapi juga bagian dari rantai transit yang dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup.

Dalam konteks perlindungan dan penanganan, Migrant Care memiliki peran penting sebagai aktor nasional yang berfokus pada advokasi HAM, pengarusutamaan perspektif *Human Security*, dan upaya memastikan bahwa Rohingya diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku pelanggaran hukum. Migrant

Care juga berkontribusi pada advokasi kebijakan di tingkat pusat, edukasi publik, dan penguatan perlindungan bagi kelompok rentan.

Dengan demikian, hasil analisis ini menggambarkan bahwa Migrant Care berperan dalam menciptakan landasan advokasi dan perspektif HAM secara nasional, sedangkan implementasi lapangan banyak bertumpu pada kapasitas jaringan lokal. Keduanya saling melengkapi, namun membutuhkan koordinasi yang lebih kuat untuk menghadapi perkembangan pola *migrant smuggling* di Aceh.

4.2 Saran

Perlu adanya peningkatan koordinasi antara Migrant Care dan Yayasan Geutanyoe agar upaya pendampingan pengungsi Rohingya dapat dilakukan secara lebih terpadu, baik dalam identifikasi kasus, pendampingan hukum, maupun perlindungan terhadap korban *smuggling*. Kolaborasi yang bersifat jangka panjang akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penanganan krisis pengungsi.

Advokasi kebijakan perlu terus diperkuat untuk mendorong pemerintah pusat menyusun regulasi yang lebih komprehensif terkait penanganan pengungsi dan pencegahan *migrant smuggling*. Penyusunan SOP nasional, mekanisme rujukan kasus, serta integrasi perspektif *Human Security* ke dalam kebijakan keamanan maritim menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

Peningkatan kapasitas aparat desa, pemerintah daerah, dan komunitas lokal menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi korban dan memastikan bahwa pengungsi yang tiba memperoleh perlindungan dasar. Pelatihan

mengenai hak asasi manusia, trafficking, dan tanggap *migrant smuggling* perlu didorong sebagai upaya memperkuat respons lokal.

Pemantauan bersama mengenai *migrant smuggling* juga perlu dilakukan, mengingat pola dan aktor yang terlibat terus berubah. Penelitian lanjutan dan sistem pelaporan lintas lembaga akan membantu merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Selain itu, edukasi publik harus diperluas untuk mengurangi stigma, mengcounter disinformasi, serta menjaga stabilitas sosial di Aceh. Penguatan narasi bahwa Rohingya adalah korban *migrant smuggling* dan krisis kemanusiaan sangat penting agar masyarakat tetap responsif dan tidak mudah terprovokasi oleh sentimen negatif.